

**RENCANA KERJA
TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURABAYA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	13
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	13
1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II	
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	45
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	45
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	46
2.3.3 Peluang dan Tantangan	47
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	48
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	87
2.5.1 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Forum Perangkat Daerah	87
2.5.2 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang.....	91
2.5.3 Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan Perangkat Daerah	92
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	93
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	93

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	94
3.2.1 Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	95
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	96
4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan...	96
4.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	97
4.3 Program dan Kegiatan	98
BAB V	
PENUTUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Surabaya.....	21
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.....	40
Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .	67
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	7
Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	8

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bagi seluruh OPD untuk menyusun rencana kerja tahun berikutnya sebagai dasar perencanaan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Dari hasil pengkajian dan evaluasi tersebut diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan nantinya tidak terjadi kegagalan, sehingga Program dan Kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang secara substansial menerjemahkan tujuan, sasaran, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMN, RKP Pemerintah Pusat, RPJMD Provinsi, dan RPJPD Pemerintah kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahun terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun setiap lima 5 (lima) tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya bertugas membentuk Keluarga berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang berdaya adalah keluarga yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memiliki perilaku hidup dan modal sosial yang positif, menyadari arti penting pendidikan, nilai hidup sehat, kepatuhan terhadap hukum, keharusan untuk terus bekerja atau berwirausaha serta menjaga kelestarian lingkungan. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memahami kegunaan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga yang bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan yang terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah serta menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Ranwal Renja PD disusun bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Evaluasi juga dilakukan dengan berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika minimal sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Sesudah Ranwal Renja selesai disusun maka tahap berikutnya yaitu penyusunan Rancangan Renja OPD yang merupakan upaya untuk penyempurnaan ranwal renja yang disusun. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Sedangkan rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan yang baru, diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah

sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. kemudian Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi kembali paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Setelah Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi maupun kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan menjadi berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Tahap selanjutnya adalah Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disusun sesuai sistematika rancangan Renja Perangkat Daerah.

Tahap terakhir penyusunan Renja adalah Penetapan Renja Perangkat Daerah. Draft Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat

Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya, serta menemukan hal yang perlu disempurnakan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah dan berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah disempurnakan rancangan akhir Renja disampaikan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, kemudian dilakukan Verifikasi lagi paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perencanaan anggaran tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam

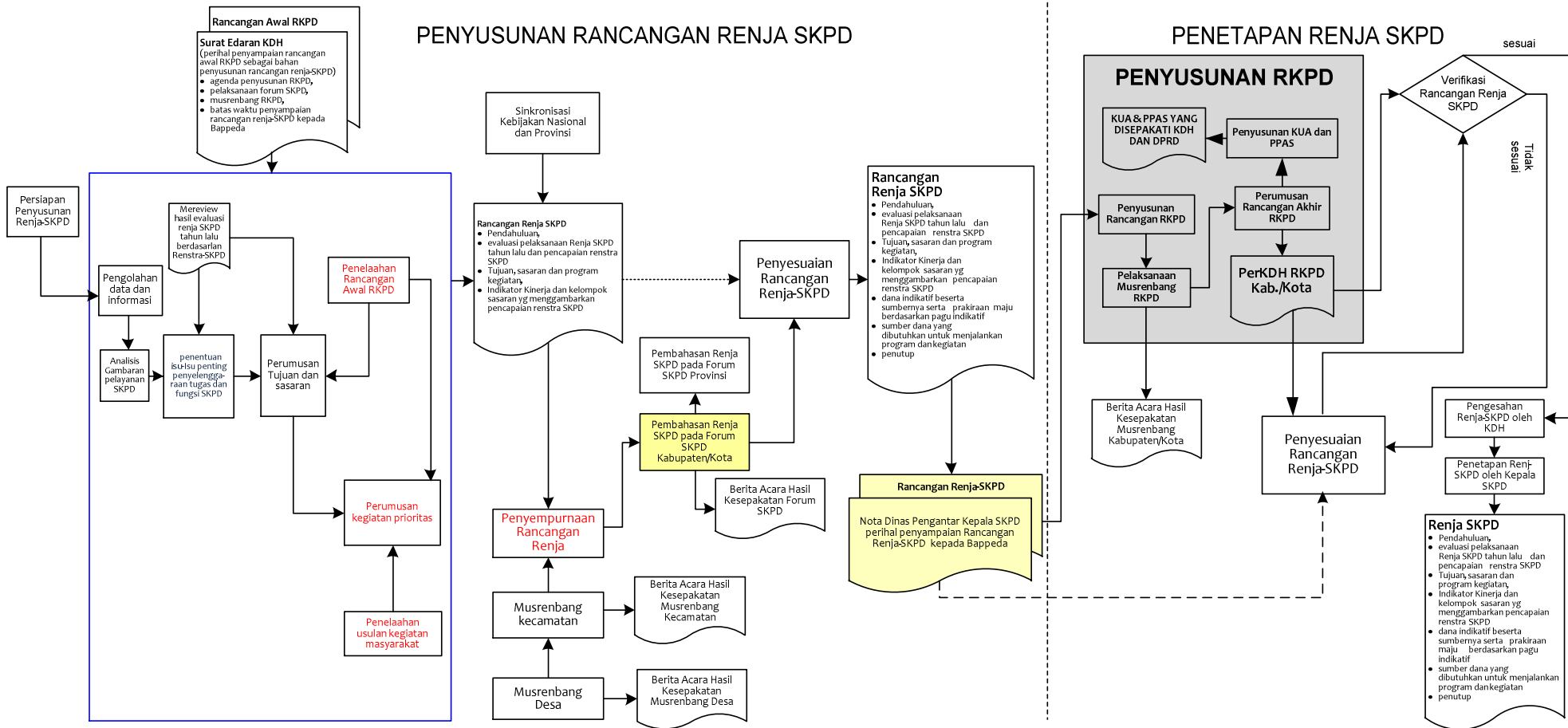
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Untuk menyusun RPJMD Kota juga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan mengacu pada RPJM Provinsi melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, merupakan pedoman untuk menyusun Renstra Kementerian/Lembaga serta dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

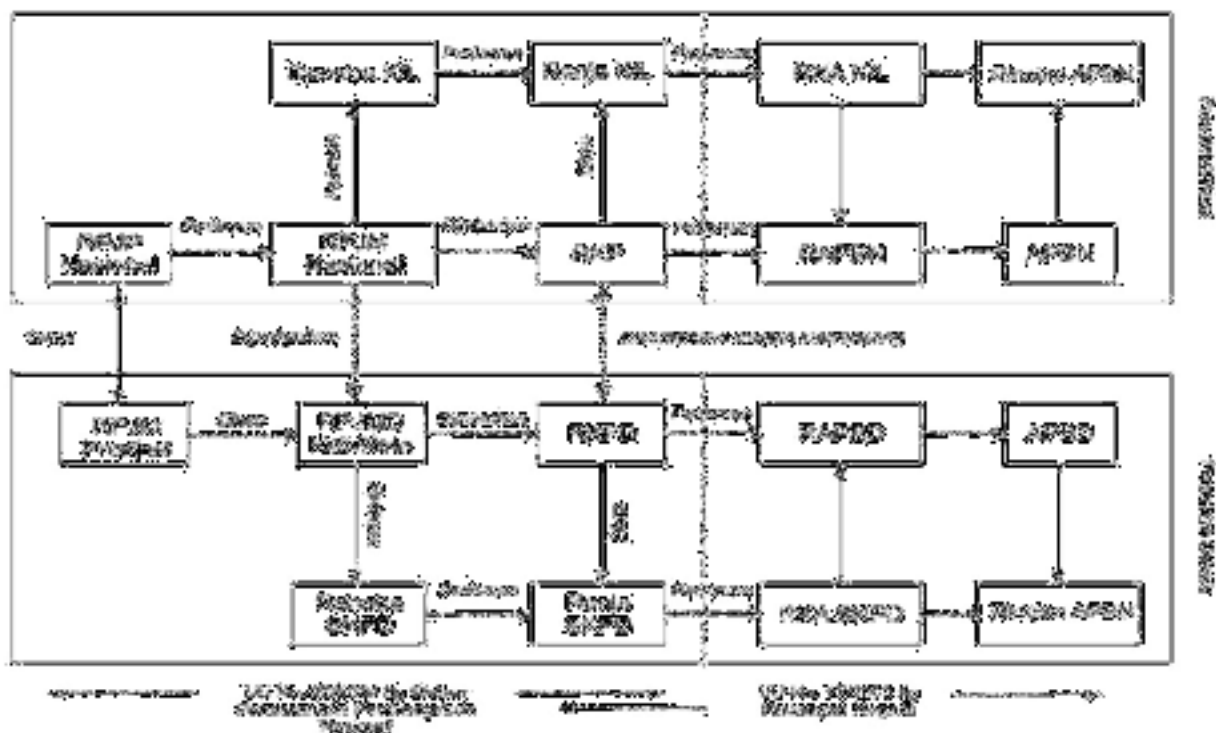
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diubah menjadi PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka RKPD Kota Surabaya akan dijadikan landasan bagi penyusunan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2023, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimana Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD).

Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap pentingnya upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup khususnya perempuan dan anak masyarakat Kota Surabaya. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara lebih transparan dengan menginformasikan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menyusun rencana strategis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan.

1.2.1 Kelembagaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Dinas;
2. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak;
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja PD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6222);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Lembaga Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025;
 25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034;
 26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20);
 27. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
 28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
 29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
 30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
 31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023;

32. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/275/436.1.2/2021 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi maupun urusan wajib dan pilihan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
- 4.3. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Kajian (review) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sistem Data dan Anak dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%. Program tersebut terdiri dari sub kegiatan berikut :
 - a) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah dokumen yang disusun. Target Tahun 2021 yaitu 2 dokumen. Realisasi tahun 2021 sebanyak 2 dokumen. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program yang pertama, Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%. Yang kedua, Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian tahun 2021 102,98%. Program tersebut terdiri dari sub kegiatan berikut:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN. Target Tahun 2021 yaitu 100%. Realisasi tahun 2021 yaitu 100%. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran. Target Tahun 2021 yaitu 100%. Realisasi tahun 2021 yaitu 100%. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
3. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerja program yang pertama, Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A) dengan capaian tahun 2021 sebesar 109,72%. Yang kedua, Persentase

permasalahan perempuan dan anak yang ditangani dengan capaian tahun sebesar 2021 100%. Program tersebut terdiri dari sub kegiatan berikut:

- a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak. Target Tahun 2021 yaitu 200 kasus. Realisasi tahun 2021 sebanyak 247 kasus. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 123,5%.
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja pertama Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan, target Tahun 2021 yaitu 2 lembaga, realisasi 2 lembaga, dan persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%. Indikator kinerja kedua Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK), target Tahun 2021 yaitu 75 orang, realisasi 75 orang, dan persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator kinerja program yang pertama, Persentase Kelurahan yang responsif gender dengan capaian tahun 2021 sebesar 82,81%. Yang kedua, Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%. Program tersebut terdiri dari sub kegiatan berikut:
- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indikator kinerja jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender. Target Tahun 2021 yaitu 72 lembaga. Realisasi tahun 2021 yaitu 72 lembaga. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
 - b) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan indikator kinerja jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan. Target Tahun 2021 yaitu 23 kali. Realisasi tahun 2021 yaitu 18 kali. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 78,26%.
5. Program Pemenuhan Anak dengan indikator kinerja Persentase Kelurahan ramah anak dengan capaian tahun 2021 sebesar 99,35%. Program tersebut terdiri dari sub kegiatan berikut:
- a) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan. Target Tahun 2021 yaitu 154 kampung.

Realisasi tahun 2021 sebanyak 154 kampung. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.

- b) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak. Target Tahun 2021 yaitu 431 lembaga. Realisasi tahun 2021 sebanyak 440 lembaga. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 102,09%.

6. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%. Program tersebut terdiri dari sub kegiatan berikut:

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK). Target Tahun 2021 yaitu 25 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 25 orang. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
- b) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building. Target Tahun 2021 yaitu 926 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 926 orang. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana yang memiliki 4 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:

- Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need). Target tahun 2021 adalah 19,22%, realisasi tahun 2021 sebesar 18,67%. Persentase capaian realisasi (lower is better) tahun 2021 yaitu 102,86%.
- Persentase peserta KB aktif. Target tahun 2021 adalah 80,95%, realisasi tahun 2021 sebesar 81,33%. Persentase realisasi tahun 2021 yaitu 100,47%.
- Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi. Target tahun 2021 adalah 2,78%, realisasi tahun 2021 sebesar 0,22%. Persentase capaian realisasi (lower is better) tahun 2021 yaitu 192,15%.
- Persentase peserta KB baru. Target tahun 2021 adalah 97,94%, realisasi tahun 2021 sebesar 63,62%. Persentase realisasi tahun 2021 yaitu 64,96%.

Program tersebut terdiri dari sub kegiatan berikut:

- a) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan indikator kinerja Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana. Target Tahun 2021 yaitu 1566 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 1566 orang. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
 - b) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan indikator kinerja Jumlah Kader IMP yang dibina. Target Tahun 2021 yaitu 1566 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 1566 orang. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
 - c) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan indikator kinerja Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Target Tahun 2021 yaitu 1950 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 896 orang. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 45,95%.
 - d) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana. Target Tahun 2021 yaitu 19 unit. Realisasi tahun 2021 sebanyak 19 unit. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
 - e) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan indikator kinerja Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB. Target Tahun 2021 yaitu 325 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 114 orang. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 35,08%.
 - f) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan indikator kinerja Jumlah Kampung KB yang dibina. Target Tahun 2021 yaitu 31 lembaga. Realisasi tahun 2021 sebanyak 31 lembaga. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan indikator kinerja program yang pertama, Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%. Yang kedua, Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi dengan capaian tahun 2021 sebesar 116,17%. Program tersebut terdiri dari sub kegiatan berikut:

- a) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) dengan indikator kinerja Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri. Target Tahun 2021 yaitu 50 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 50 orang. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
- b) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator kinerja pertama Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan, target Tahun 2021 yaitu 38 unit, realisasi 0 unit, dan persentase realiasi tahun 2021 yaitu 0%. Indikator kinerja kedua Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan, target Tahun 2021 yaitu 1 bangunan, realisasi 1 bangunan, dan persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
- c) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator kinerja Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera. Target Tahun 2021 yaitu 480 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 484 orang. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100,83%.
- d) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator kinerja Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi. Target Tahun 2021 yaitu 875 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 875 orang. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
- e) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator kinerja Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan. Target Tahun 2021 yaitu 2 lembaga. Realisasi tahun 2021 sebanyak 2 lembaga. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.
- f) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator kinerja Jumlah lembaga yang mendapat

fasilitasi pengembangan usaha ekonomi. Target Tahun 2021 yaitu 15 lembaga. Realisasi tahun 2021 sebanyak 15 lembaga. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.

9. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian tahun 2021 sebesar 102,98%. Program tersebut terdiri dari sub kegiatan berikut:
 - a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran. Target Tahun 2021 yaitu 100%. Realisasi tahun 2021 yaitu 100%. Persentase realiasi tahun 2021 yaitu 100%.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Surabaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak									
		Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan		100%	100%	100%	100%			
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00 %			
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah						2 Kali		
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen							
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		88.22 %	88%	90.62 %	102.98%			
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		99.5 %	100%	100%	100%			
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN			100%	100.00 %	100.00 %	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN</i>			100%	100.00 %	100.00 %	100%		
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi</i>						15 Rekening		
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran</i>		100.00 %	100%	100.00 %	100.00 %			
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi</i>						6 Rekening		
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan							
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket							
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan							
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak									
		Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)		84%	74.98 %	82.27 %	109.72%			
		Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani		100%	100%	100%	100%			
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)</i>			75 Orang	75.00 Orang	100.00 %			
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak	<i>Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan</i>			2 lembaga	2.00 lembaga	100.00 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak		233.00 kasus	200 kasus	247.00 kasus	123.50 %			
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus						150 kasus		
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima						150 kasus		
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen							
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang							
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Layanan							
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.02	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan									
		Persentase kelurahan yang responsif gender		20.13 %	41.56 %	34.42 %	82.81%			
		Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan		100%	100%	100%	100%			
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender			72 lembaga	72.00 lembaga	100.00 %			
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender						58 Lembaga		
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan		16.00 kali	23 kali	18.00 kali	78.26 %			
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan						4 Kali		
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan						740 Orang		
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi							
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang							
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)									
		Persentase kelurahan ramah anak		77.27 %	100%	99.35 %	99.35%			
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan</i>						20 Kelurahan		
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak</i>			431 lembaga	440.00 lembaga	102.09 %			
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan</i>		154.00 kampung	154 kampung	154.00 kampung	100.00 %			
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak</i>						431 Lembaga		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan						2 Lembaga		
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi							
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang							
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga									
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan						2 lembaga		
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan							
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani		100%	100%	100%	100%			
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building</i>			926 orang	926.00 orang	100.00 %			
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan</i>						100 orang		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)</i>			25 Orang	25.00 Orang	100.00 %			
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan</i>						17 kasus		
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti</i>						20 kasus		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan							
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)									
		Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif		100%	100%	100%	100%			
		Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi		21.74 %	10.33 %	12%	116.17%			
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi</i>		5.00 lembaga	15 lembaga	15.00 lembaga	100.00 %			
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi</i>			875 orang	875.00 orang	100.00 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	<i>Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri</i>		23.00 orang	50 orang	50.00 orang	100.00 %			
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan</i>		1.00 bangunan	1 bangunan	1.00 bangunan	100.00 %			
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan</i>		4.00 unit	38 Unit	0.00 Unit	0.00 %			
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan</i>		2.00 lembaga	2 lembaga	2.00 lembaga	100.00 %			
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera</i>		180.00 orang	480 orang	484.00 orang	100.83 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi						14 keluarga		
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)						31 kecamatan		
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga BKB yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						344 keluarga		
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						113 keluarga		
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						54 keluarga		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)						28 paket		
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga						160 keluarga		
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)						10 paket		
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	49 Kelompok							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38 Unit							
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	625 Orang							
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6642 Orang							
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan							
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)									
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)		17.63 %	19.22 %	18.67 %	102.86%			
		Persentase peserta KB aktif		82.37 %	80.95 %	81.33 %	100.47%			
		Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi		0.16 %	2.78 %	0.22 %	192.15%			
		Persentase peserta KB baru		50.76 %	97.94 %	63.62 %	64.96%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana			1566 orang	1,566.00 orang	100.00 %			
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina			31 Lembaga	31.00 Lembaga	100.00 %			
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK						31 Kecamatan		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yang dibina			1566 Orang	1,566.00 Orang	100.00 %			
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)						1566 Orang		
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK						12 kali		
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK						1950 orang		
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB		149.00 orang	325 orang	114.00 orang	35.08 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1950 Orang	896.00 Orang	45.95 %	1950 orang		
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana		64.00 Paket	19 unit	19.00 unit	100.00 %			
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus						414961 Orang		
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK						19 Unit		
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan							
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan							
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga	1 Laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang							
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan							
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang							
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit							
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	31 Kampung							
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk									
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan	<i>Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan</i>						140 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal									
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	<i>Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan</i>						1 Dokumen		
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	75 Satuan Pendidikan							
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen							
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen							
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
4.01	Sekretariat Daerah									
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		88.22 %	88%	90.62 %	102.98%			
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran</i>		100.00 %	100%	100.00 %	100.00 %			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kepadatan penduduk di beberapa kecamatan mencapai lebih dari 20.000 jiwa diantaranya Kecamatan Wonokromo, Tegalsari, Sawahan, Tambaksari, Simokerto, Bubutan, Semampir dan Kenjeran, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebagai Lembaga Teknis Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus yaitu di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan dan monitoring di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. Selain itu juga memberikan pelayanan dengan Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. Di bidang perlindungan perempuan dan anak bentuk layanan yang diberikan adalah koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak skala kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya berdasarkan tugas dan fungsinya bisa dilihat dari capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berikut capaian pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	Renstra 2021-2026
2	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	Renstra 2016-2021
3	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi	-	-	2 rekening	6 rekening	6 rekening	6 rekening	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
4	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	-	-	72 lembaga	-	-	-	72 lembaga	-	-	-	Renstra 2016-2021
5	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	-	-	72 lembaga	58 lembaga	58 lembaga	58 lembaga	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
6	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	-	-	23 kali	-	-	-	18 kali	-	-	-	Renstra 2016-2021
7	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	-	-	0 kali	4 kali	4 kali	4 kali	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
8	Jumlah Perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)	-	-	25 orang	-	-	-	25 orang	-	-	-	Renstra 2016-2021
9	Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti	-	-	17 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
10	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	-	-	17 kasus	17 kasus	17 kasus	17 kasus	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
11	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	-	-	956 orang	-	-	-	956 orang	-	-	-	Renstra 2016-2021

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	2 dokumen	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	Renstra 2016-2021
13	Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah	-	-	0 kali	2 kali	2 kali	2 kali	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
14	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	-	-	154 kampung	-	-	-	154 kampung	-	-	-	Renstra 2016-2021
15	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	-	-	431 lembaga	-	-	-	440 lembaga	-	-	-	Renstra 2016-2021
16	Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	-	-	279 lembaga	431 lembaga	431 lembaga	431 lembaga	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
17	Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan	-	-	53 kelurahan	20 kelurahan	20 kelurahan	20 kelurahan	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
18	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	-	-	200 kasus	-	-	-	247 kasus	-	-	-	Renstra 2016-2021
19	Jumlah pengaduan yang diterima	-	-	99 kasus	150 kasus	150 kasus	150 kasus	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
20	Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	-	-	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	-	-	-	Renstra 2016-2021
21	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)	-	-	75 orang	-	-	-	75 orang	-	-	-	Renstra 2016-2021
22	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	150 kasus	150 kasus	150 kasus	150 kasus	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
23	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	-	-	1566 orang	-	-	-	1566 orang	-	-	-	Renstra 2016-2021
24	Jumlah Kader IMP yang dibina	-	-	1566 orang	-	-	-	1566 orang	-	-	-	Renstra 2016-2021

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	-	-	1566 orang	1566 orang	1566 orang	1566 orang	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
26	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	1950 orang	-	-	-	896 orang	-	-	-	Renstra 2016-2021
27	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK	-	-	1950 orang	1950 orang	1950 orang	1950 orang	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
28	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	-	-	19 unit	-	-	-	19 unit	-	-	-	Renstra 2016-2021
29	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK	-	-	19 unit	19 unit	19 unit	19 unit	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
30	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	-	-	325 orang	-	-	-	114 orang	-	-	-	Renstra 2016-2021
31	Jumlah Kampung KB yang dibina	-	-	31 lembaga	-	-	-	31 lembaga	-	-	-	Renstra 2016-2021
32	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	-	-	31 kecamatan	31 kecamatan	31 kecamatan	31 kecamatan	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
33	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	-	-	50 orang	-	-	-	50 orang	-	-	-	Renstra 2016-2021
34	Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	-	-	50 orang	100 orang	150 orang	200 orang	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
35	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	-	-	38 unit	-	-	-	0 unit	-	-	-	Renstra 2016-2021

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)	-	-	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
37	Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)	-	-	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
38	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	-	-	1 bangunan	-	-	-	1 bangunan	-	-	-	Renstra 2016-2021
39	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	-	-	480 orang	-	-	-	484 orang	-	-	-	Renstra 2016-2021
40	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	-	-	875 orang	-	-	-	875 orang	-	-	-	Renstra 2016-2021
41	Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	-	25 keluarga	160 keluarga	196 keluarga	216 keluarga	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
42	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	-	-	2 lembaga	-	-	-	2 lembaga	-	-	-	Renstra 2016-2021
43	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	-	-	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
44	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	-	-	15 lembaga	-	-	-	15 lembaga	-	-	-	Renstra 2016-2021
45	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	Renstra 2016-2021
46	Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi	-	-	6 rekening	15 rekening	15 rekening	15 rekening	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
47	Jumlah keluarga BKB yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	0	344 keluarga	421 keluarga	574 keluarga	-	-	-	-	Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	0	113 keluarga	139 keluarga	189 keluarga	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
49	Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	0	54 keluarga	65 keluarga	89 keluarga	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
50	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)			31 kecamatan	31 kecamatan	31 kecamatan	31 kecamatan	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
51	Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi	-	-	0 keluarga	14 keluarga	15 keluarga	16 keluarga	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
52	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	-	-	0 orang	140 orang	150 orang	160 orang	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
53	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan	-	-	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
54	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK	-	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
55	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	-	-	412470 orang	414961 orang	415007 orang	415054 orang	-	-	-	-	Renstra 2021-2026
56	Jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-	-	0 orang	740 orang	740 orang	740 orang	-	-	-	-	Renstra 2021-2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
- b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan *trafficking* (perdagangan orang).
- c. Salah satu program untuk pencegahan kemiskinan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyejahteraan keluarga. Upaya preventif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendampingan kelompok tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
- d. Masih adanya ketimpangan gender yang terjadi baik di pemerintahan maupun masyarakat dalam pemenuhan indikator 7 prasyarat pengarusutamaan gender (PUG).

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Renja tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan hampir tercapai 100%. Begitu pula pada Renja tahun 2021 capaian realisasi terhadap target mendekati angka 100% di semua kegiatan.

Sedangkan Capaian Renstra 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2021 hampir seluruh kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun sejak tahun 2020 banyak indikator kinerja dan target kegiatan yang berubah, mengikuti perubahan Misi Kepala Daerah Kota Surabaya.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Pada pelaksanaan Renja tahun 2021 tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang berarti dan apabila terdapat hambatan bisa dengan cepat dicarikan solusi melalui koordinasi. Hal ini dapat dilakukan berkat dukungan dana yang sudah dianggarkan, serta dukungan sumber daya manusia yang menjalankan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Sedangkan untuk tahun 2022 terdapat perubahan birokrasi dan struktur organisasi mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 3 Tahun 2021 sehingga diperlukan penyesuaian pelaksana tugas.

Permasalahan dan Hambatan yang muncul bisa diidentifikasi melalui analisa kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Kekuatan yang dimiliki terdiri dari:

1. Anggaran kegiatan
2. Sarana dan Prasarana perkantoran
3. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4. Kewenangan untuk melaksanakan program Program Pengendalian Penduduk
5. Kewenangan untuk melaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
6. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
7. Kewenangan untuk melaksanakan program Peningkatan Kualitas Keluarga
8. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
9. Kewenangan untuk melaksanakan program Perlindungan Perempuan
10. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11. Kewenangan untuk melaksanakan program Perlindungan Khusus Anak
12. Kewenangan untuk melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
13. Dokumen Manajemen Risiko
14. Proses Bisnis Instansi dan SOP untuk pelaksanaan kegiatan

b. Kelemahan yang dimiliki antara lain:

1. Jumlah dan Kompetensi SDM
2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan Operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
3. Pemanfaatan data penjangkauan masyarakat

c. Permasalahan terkait capaian kinerja dalam rancangan teknokratik RPJMD 2021-2026 terdiri dari :

1. Belum optimalnya KIE terkait kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga bagi remaja;
2. Belum optimalnya capaian Kelurahan Ramah Anak;
3. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam Ipoleksosbud;
4. Belum optimalnya kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
5. Belum optimalnya penggunaan Metode KB Jangka Panjang;
6. Masih adanya permasalahan pada perempuan dan anak.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Peluang yang dimiliki terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya
4. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar OPD

b. Ancaman yang dimiliki terdiri dari:

1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya
2. Overlapping program dan kegiatan antar OPD
3. Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak
4. Kondisi pandemi yang tidak bisa diperkirakan selesainya

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 1. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, hal ini bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan permasalahan perempuan dan anak antara lain trafficking, permasalahan remaja lainnya yang salah satunya dipicu oleh dampak pandemi Covid-19.
 2. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
 3. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi.
 2. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmet need).
 3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
 4. Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja / beraktivitas di Kota Surabaya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada sub kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 10.567.629.918,- outputnya terdiri dari :

Target : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
24 Orang/bulan

Kelompok Sasaran : ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 48

- Bentuk Kegiatan : Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Materi Kegiatan : Tersedianya anggaran pemenuhan gaji dan tunjangan ASN
Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
Alasan Pemilihan Target : Pertimbangan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp.2.533.198.720,- outputnya terdiri dari :
- Target : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 5 paket
Kelompok Sasaran : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bentuk Kegiatan : Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
Materi Kegiatan : Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
Alasan Pemilihan Target : Memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 474.272.408,- outputnya terdiri dari :
- Target : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 laporan
Kelompok Sasaran : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bentuk Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Materi Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
Alasan Pemilihan Target : Memenuhi ketersediaan barang dan jasa perangkat daerah agar tercapai efektivitas pekerjaan
4. Kegiatan Pelembagaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu anggaran Rp.623.537.771,- outputnya terdiri dari :
- Target : Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

- Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 58 Perangkat Daerah
- Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah Kota Surabaya, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya
- Bentuk Kegiatan : Capacity Building, pendampingan dan evaluasi PUG, presentasi profil Kecamatan Responsif Gender, diskusi interaktif, serta simulasi materi yang dipandu oleh pemateri/praktisi.
- Materi Kegiatan : Dilaksanakan dengan melakukan capacity building serta dilakukan evaluasi secara langsung sehingga diharapkan Pengarusutamaan Gender dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
- Frekuensi Pelaksanaan : Berdasarkan pertimbangan teknis pendampingan terhadap Perangkat Daerah dan Kecamatan
- Alasan Pemilihan Target : Membangun Sinergi dengan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan perihal sosialisasi dan advokasi peningkatan pemahaman gender.
5. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan pagu anggaran Rp. 322.932.471,- outputnya terdiri dari :
- Target : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Organisasi
- Kelompok Sasaran : Gabungan Organisasi Perempuan (GOW)
- Bentuk Kegiatan : Sosialisasi terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi
- Materi Kegiatan : Peningkatan Peran Organisasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- Frekuensi Pelaksanaan : 1 Tahun dilaksanakan sebanyak 4 kali.
- Alasan Pemilihan Target : Gabungan Organisasi Wanita merupakan mitra Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan perempuan serta pendorong program-program pemerintah kota yang dapat meningkatkan kemandirian serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang ekonom, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya.
6. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1.161.945.223,- outputnya terdiri dari :
- Target : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 740 orang
- Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 50

- Kelompok Sasaran : Tim Penggerak Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Surabaya dan Dharma Wanita Persatuan (DWP)
- Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Program Kerja Kegiatan TP PKK, Pencanaan Pilot Project Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (PKK), Pelatihan Kader PKK, Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 50 Tahun 2022, Lomba 10 Program Pokok PKK antar Kecamatan, Persiapan mengikuti Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK TK Jawa Timur, Mengadakan Lomba PHBS dalam Rangka Kesatuan Gerak PKK antar PKK Kecamatan se-Kota Surabaya Tahun 2022, Mengadakan Lomba PHBS dalam Rangka Kesatuan Gerak PKK Tingkat Prop. Jawa Timur Tahun 2022, Pendataan Kader PKK, Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya, Peringatan Hari Kartini TP PKK Kota Surabaya, Peringatan Hari Ibu TP PKK Kota Surabaya, Pelatihan Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital, Sosialisasi CEPAK (Cegah Perkawinan Anak) menuju Keluarga Sehat dan Harmonis, Revitalisasi Peran Kader Pos Curhat di Era Pandemi, Sosialisasi Peran Gender dan Pencegahan KDRT, Lomba Mendongeng bagi Kader BKB, Pelatihan Membuat Eco Printing bagi Kader PKK, Pelatihan dan Pemanjapan Kader PKK dalam Mengatasi dan Pencegahan Stunting di Kota Surabaya dengan Memberikan Edukasi Gizi Seimbang, Sosialisasi tentang Pentingnya Pemahaman dan Kesertaan dalam Program KB menuju Keluarga yang Berkualitas, Sosialisasi Pentingnya Penerapan PHBS di Lingkungan Keluarga di Masa Pandemi Covid
- Materi Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam upaya Pemberdayaan serta Penyediaan Layanan bagi Perempuan di tingkat Kota
- Frekuensi Pelaksanaan : 1 Tahun dilaksanakan sebanyak 21 kali kegiatan
- Alasan Pemilihan Target : TP. PKK Kota Surabaya merupakan pemerhati pemberdayaan perempuan di Kecamatan / Kelurahan dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang merupakan Organisasi Kewanitaan beranggotakan istri PNS sebagai mitra kerja Pemerintah dalam mendorong program-program yang dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan
7. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal dengan pagu anggaran Rp. 244.235.000,- outputnya terdiri dari :
- Target : Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
- Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 51

- Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal 72 Satuan Pendidikan
- Kelompok Sasaran : Guru Geografi, Guru BK, Wakil Kepala Sekolah
- Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan
- Materi Kegiatan : Pembekalan Guru SMP dalam pengintegrasian Pendidikan Kependudukan
- Frekuensi Pelaksanaan : 4 kali dalam setahun
- Alasan Pemilihan Target : Generasi Muda bagian dalam program mewujudkan Bangsa Kencana melalui guru / pendidik
8. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki dua sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan** : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
- Target : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 dokumen
- Pagu Anggaran : Rp. 45.510.000,-
- Kelompok Sasaran : Kader, Petugas Pencatatan dan Pelaporan, Tim Pendamping Keluarga
- Bentuk Kegiatan : Cetak Data Keluarga berisiko *stunting* adalah *Output* Keluarga Berisiko *Stunting* per RT hasil PK2021 yang dicetak dan hasil cetakan itu akan digunakan untuk *updating* pada saat *surveillance* keluarga berisiko *stunting*
- Materi Kegiatan : *Updating* dan peta kerja pada saat *surveillance* bagi pelaksana lini lapangan/Tim Pendamping Keluarga yang melakukan pendataan selama 1 (satu) tahun
- Frekuensi Pelaksanaan : 1 Dokumen
- Alasan Pemilihan Target : Pemetaan keluarga yang berisiko *stunting* yang *ter-update*
- Sub Kegiatan** : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- Target : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 dokumen
- Pagu Anggaran : Rp. 171.764.750,-
- Kelompok Sasaran : Bappedalitbang, Disnaker, Dispendik, Dinkes, Diskominfo, 31 Kecamatan
- Bentuk Kegiatan : Desiminasi / Penyebarluasan informasi profil kependudukan
- Materi Kegiatan : Profil Kependudukan
- Frekuensi Pelaksanaan : satu kali dalam setahun
- Alasan Pemilihan Target : Penguatan Jejaring melalui kemitraan
9. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal memiliki dua sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan** : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 52

Target	:	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 laporan
Pagu Anggaran	:	Rp. 483.600.000,-
Kelompok Sasaran	:	Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penyuluh KB/PLKB (ASN dan Non ASN)
Bentuk Kegiatan	:	Kegiatan pertemuan yang diinisiasi oleh Pengurus TP PKK Kecamatan dan dipimpin oleh Camat dengan melibatkan Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Penyuluh KB/PLKB (PNS dan Non PNS), Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Damdramil, Kapolsek, dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat Kecamatan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat Kecamatan serta pembinaan (coach) Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 STANDAR dan 4 PASTI.
Materi Kegiatan	:	Evaluasi dan pemantauan hasil pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat kecamatan serta pembinaan Tim Pendamping Keluarga agar terwujud 3 STANDART dan 4 PASTI
Frekuensi Pelaksanaan	:	Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali dan 12 (dua belas) kali dalam setahun.
Alasan Pemilihan Target	:	Target yang akan dilakukan dalam rangka pengawalan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan keluarga dan program percepatan penurunan <i>stunting</i> di seluruh Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan
Sub Kegiatan	:	Pengendalian Program KKBPK
Target	:	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 laporan
Pagu Anggaran	:	Rp. 40.000.000,-
Kelompok Sasaran	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PLKB, PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas, Ahli Gizi Puskesmas, Bidan Puskesmas, TPPS Kota, TPPS Kecamatan dan TPPS Kelurahan
Bentuk Kegiatan	:	Audit kasus <i>stunting</i>

- Materi Kegiatan : 1. Identifikasi jumlah kasus, penyebab, tata kelola yang sedang diterapkan, tingkat efektivitas serta kendala yang terjadi.
2. Merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dibahas pada audit kasus stunting di tiap daerah.
3. Evaluasi hasil tindak lanjut yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi tindakan/penanganan yang tepat pada kasus stunting
- Frekuensi : 2 kali dalam Satu Tahun
- Pelaksanaan
- Alasan Pemilihan Target : Tersedianya laporan audit kasus stunting di tingkat kabupaten/kota.

10. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) memiliki dua sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan** : Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Target : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 laporan
- Pagu Anggaran : Rp. 995.886.999,-
- Kelompok Sasaran : Kader, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
- Bentuk Kegiatan : Pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK
- Materi Kegiatan : Pembinaan terhadap pembantu pembina keluarga berencana kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di kecamatan masing-masing dengan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.
- Frekuensi : 12 kali
- Pelaksanaan
- Alasan Pemilihan Target : Setiap kelurahan memiliki kader KB untuk melakukan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB dan setiap kelurahan memiliki pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBK) serta Sub PPKBK yang ada di tingkat RW untuk mendukung program Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk.
- Sub Kegiatan** : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- Target : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1566 Orang

Pagu Anggaran	:	Rp. 840.464.600,-
Kelompok Sasaran	:	Kader IMP
Bentuk Kegiatan	:	Melakukan Pembinaan kepada Pembina KB Kelurahan (PPKBK) serta Sub PPKBK yang ada di tingkat RW yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan masing-masing.
Materi Kegiatan	:	Pembinaan Peduli Keluarga Berencana adalah Pembinaan Kegiatan Institusi Masyarakat Perkotaan Pembinaan dalam Capacity Building dan evaluasi program KB di kecamatan masing-masing dengan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.
Frekuensi Pelaksanaan	:	2 Hari x 12 kali dalam Satu Tahun
Alasan Pemilihan Target	:	Setiap kelurahan memiliki kader KB untuk melakukan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB dan setiap kelurahan memiliki pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBK) serta Sub PPKBK yang ada di tingkat RW untuk mendukung program Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk.

11. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota memiliki tiga sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan	:	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Target	:	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 laporan
Pagu Anggaran	:	Rp. 1.656.142.633,-
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat, calon akseptor KB dan Pasangan Usia Subur
Bentuk Kegiatan	:	Memberikan Pelayanan KB MOW dan MOP pada Pasangan Usia Subur warga Kota Surabaya yang dilaksanakan dengan melakukan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan maupun melalui Bkati Sosial
Materi Kegiatan	:	Pelayanan KB MOW dan MOP
Frekuensi Pelaksanaan	:	12 bulan
Alasan Pemilihan Target	:	Sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk dalam rangka mengendalikan kualitas penduduk melalui Keluarga Berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengendalian kelahiran dari Pasangan Usia Subur.
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Target	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1950 orang
Pagu Anggaran	:	Rp. 5.294.543.400,-
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat, calon akseptor KB dan Pasangan Usia Subur
Bentuk Kegiatan	:	Memberikan Pelayanan KB IUD, Implan, MOW dan MOP pada Pasangan Usia Subur yang dilaksanakan dengan melakukan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan maupun melalui Bkati Sosial (DAK)
Materi Kegiatan	:	Pelayanan KB IUD, Implan, MOW dan MOP
Frekuensi Pelaksanaan	:	12 bulan
Alasan Pemilihan Target	:	Sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk dalam rangka mengendalikan kualitas penduduk melalui Keluarga Berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengendalian kelahiran dari Pasangan Usia Subur (DAK)
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Target	:	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 19 unit
Pagu Anggaran	:	Rp. 1.020.000.000,-
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Bentuk Kegiatan	:	Lelang(Tender) atau/dan Penunjukan Langsung atau/dan e-katalog.
Materi Kegiatan	:	Lelang(Tender) atau/dan Penunjukan Langsung atau/dan e-katalog.
Frekuensi Pelaksanaan	:	1 kali
Alasan Pemilihan Target	:	Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Subbidang KB sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022, antara lain adalah untuk: Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mendukung tercapainya TFR sebesar 2,1 pada tahun 2024 dan mendukung tercapainya intervensi program penurunan stunting berdasarkan lokus yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas; • Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; • Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah; Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia; • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu;

12. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB memiliki satu sub kegiatan yaitu Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan pagu anggaran Rp. 589.000.000,- outputnya terdiri dari :

- Target : Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 31 Kecamatan
- Kelompok Sasaran : Kampung KB di 31 Kecamatan
- Bentuk Kegiatan : Pembinaan Kampung yang dipilih sebagai kampung KB sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022
- Materi Kegiatan : Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas, pembinaan dan penyuluhan Kampung KB di tingkat desa/kelurahan; > Pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD); > Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan Keluarga berencana yang teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; > Penggerakan dan Pelayanan KB IUD, Implan, MOW dan MOP pada Fasilitas Kesehatan dan PMB yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh Kecamatan yang menjadi sasaran;
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
- Alasan Pemilihan : Kegiatan dimaksud ditujukan untuk mendampingi secara intensif wilayah RW yang kondisinya jumlah penduduk, kegiatan ketahanan keluarga, kelompok kegiatan, kebersihan dan lain-lain dianggap masih kurang untuk menjadi lebih baik. Serta untuk pencapaian target/sasaran program Pro PN prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- Target : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

13. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 35.377.040,- outputnya terdiri dari :

- Target : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 dokumen
Kelompok Sasaran	:	Organisasi Keagamaan, organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Adat / Lembaga Profesi / Dunia Usaha / Media / Masyarakat Lainnya
Bentuk Kegiatan	:	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui sosialisasi dan media cetak
Materi Kegiatan	:	Materi terkait yang mendukung pencegahan kekerasan perempuan menyesuaikan dengan kondisi kasus tahun berjalan
Frekuensi Pelaksanaan	:	1 Kali dalam 1 Tahun
Alasan Pemilihan Target	:	Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dilakukan 1 Kali dalam 1 tahun

14. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki dua sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Target	:	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 20 orang
Pagu Anggaran	:	Rp. 100.200.000,-
Kelompok Sasaran	:	Perempuan Korban Kekerasan Termasuk Trafficking Warga Surabaya
Bentuk Kegiatan	:	1. Penerimaan Pengaduan yang dilanjutkan dengan penanganan awal 2. Penerimaan bersumber dari Warga, Command Center, Hotline PPTP2A, Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, Aparat Penegak Hukum, OPD, Kelurahan, Kecamatan, maupun Jejaring PPTP2A
Materi Kegiatan	:	Penanganan Awal melalui telepon / chat menyesuaikan kondisi klien
Frekuensi Pelaksanaan	:	12 bulan
Alasan Pemilihan Target	:	Jumlah kasus pengaduan kekerasan perempuan dalam 12 Tahun
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Target	:	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 17 layanan
Pagu Anggaran	:	Rp. 63.212.000,- Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

- Kelompok Sasaran : Perempuan Korban Kekerasan Termasuk Trafficking Warga Surabaya
- Bentuk Kegiatan : Memberikan Pendampingan dan Penanganan melalui layanan PPTP2A berupa Konseling, Pendampingan Medis, Pendampingan Psikososial, Pendampingan Hukum
- Materi Kegiatan : Pendampingan dan Penanganan yang diberikan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan klien
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
- Alasan Pemilihan Target : Jumlah kasus yang ditangani dalam 12 Bulan
15. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota satu sub kegiatan yaitu Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kotadengan pagu anggaran Rp. 373.754.297,- outputnya terdiri dari :
- Target : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 dokumen
- Kelompok Sasaran : Relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) Yang ada di Kecamatan
- Bentuk Kegiatan : Sosialisasi, Advokasi, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan Relawan dalam menangani permasalahan Perempuan dan Anak
- Materi Kegiatan : Dilaksanakan menyesuaikan isu permasalahan perempuan dan anak yang terjadi pada tahun berjalan
- Frekuensi Pelaksanaan : 4 kali dalam setahun
- Alasan Pemilihan Target : Relawan PKBM tersebar di masing masing Kecamatan di Kota Surabaya sebagai mitra kerja ditingkat Kecamatan yang membantu Pemerintah Kota Surabaya
16. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga memiliki lima sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan** : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- Target : Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk 49 kelompok
- Pagu Anggaran : Rp. 1.067.105.902,-
- Kelompok Sasaran : Kader, orang tua dan/atau pihak-pihak yang memiliki balita, remaja dan lansia

Bentuk Kegiatan	:	Pembentukan dan pendampingan kelompok BKB/BKR/BKL
Materi Kegiatan	:	Pembentukan dan pendampingan terhadap kader/orangtua yang memiliki Balita/Remaja/Lansia
Frekuensi Pelaksanaan	:	Satu tahun delapan kali
Alasan Pemilihan Target	:	Untuk mendukung kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target	:	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 38 unit
Pagu Anggaran Kelompok Sasaran	:	Rp. 747.866.000,-
	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kader, orang tua dan/atau pihak-pihak yang memiliki balita yang berada di wilayah lokus stunting - Catin dan/atau masyarakat yang mempunyai remaja yang berada di wilayah lokus stunting
Bentuk Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sarana Kelompok berupa BKB Kit Stunting - Pengadaan Sarana Kelompok berupa Kit Siap Nikah Anti Stunting
Materi Kegiatan	:	Dokumen dan Barang Pelaksanaan Pengadaan Sarana Kelompok
Frekuensi Pelaksanaan	:	satu kali dalam setahun
Alasan Pemilihan Target	:	Untuk mendukung kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Sub Kegiatan	:	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target	:	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 625 orang
Pagu Anggaran Kelompok Sasaran	:	Rp. 592.985.245,-
	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kader, orang tua dan/atau pihak-pihak yang memiliki balita - Kader, orang tua dan/atau pihak-pihak yang memiliki remaja - Kader, orang tua dan/atau pihak-pihak yang memiliki lansia

Bentuk Kegiatan	:	Orientasi dan Pendampingan terhadap Kader/Masyarakat Kota Surabaya
Materi Kegiatan	:	Orientasi dan Pendampingan terhadap kader dan keluarga yang memiliki balita, remaja, dan lansia
Frekuensi Pelaksanaan	:	1 kali BKB dalam setahun 1 kali BKR dalam setahun 1 kali BKL dalam setahun
Alasan Pemilihan Target	:	Untuk mendukung kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target	:	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 6642 orang
Pagu Anggaran	:	Rp. 12.820.360.000,-
Kelompok Sasaran	:	Tim Pendamping Keluarga di 31 Kecamatan
Bentuk Kegiatan	:	TPK Melakukan Pendampingan terhadap CATIN, Ibu Hamil, Ibu PASca Melahirkan
Materi Kegiatan	:	Sosialisasi dan percepatan penurunan stunting
Frekuensi Pelaksanaan	:	12 bulan
Alasan Pemilihan Target	:	Untuk mendukung kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Sub Kegiatan	:	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target	:	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 laporan
Pagu Anggaran	:	Rp. 661.017.613,-
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Marginal (Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai Akseptor KB)
Bentuk Kegiatan	:	Sosialisasi dan pendampingan peserta promosi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Materi Kegiatan	:	- Assessment calon peserta (verifikasi data dan penelusuran minat) - Pembekalan softskill dan kewirausahaan (motivasi) - Pendampingan

- Frekuensi : Pelaksanaan kegiatan 8 kali dalam setahun
 Pelaksanaan
 Alasan Pemilihan : Mendukung pencapaian sub kegiatan Promosi dan
 Target Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
17. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 668.528.387,- outputnya terdiri dari :
- Target : Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 layanan
- Kelompok Sasaran : Puspaga Umum dan Puspaga ABK
 Bentuk Kegiatan : 1. Melakukan pelayanan konseling / konsultasi umum maupun ABK bagi Masyarakat Kota Surabaya
 2. Melakukan psikoedukasi bagi anak, orang tua atau keluarga
 3. Melakukan kegiatan bimbingan masyarakat melalui kegiatan Parenting Umum, Parenting ABK, Pra Nikah baik secara luring maupun daring
 4. Melakukan Promosi, Sosialisasi Puspaga ke Masyarakat Kota Surabaya baik secara daring maupun luring
- Materi Kegiatan : 1.Konseling seputar anak, orang tua, dan keluarga
 2.Psikoedukasi, Parenting Umum dan Parenting ABK menyesuaikan trend kondisi pada tahun berjalan
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
 Alasan Pemilihan : Untuk Mendukung pelayanan konseling dan konsultasi kepada masyarakat diperlukan Puspaga Umum & Puspaga ABK
 Target
18. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 408.898.881,- outputnya terdiri dari :
- Target : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 dokumen
- Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya, dan seluruh Kecamatan di Kota Surabaya
- Bentuk Kegiatan : Capacity Building dalam penyediaan dan penyusunan data gender dan anak pada setiap Peringkat Daerah di Kota Surabaya
- Materi Kegiatan : Pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan /program /kegiatan pembangunan yang responsif gender di Kota Surabaya
- Frekuensi : Berdasarkan pertimbangan teknis pendampingan
 Pelaksanaan terhadap Perangkat Daerah dan Kecamatan
 Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 62

Alasan Pemilihan Target : Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilih untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di Kota Surabaya.

19. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 747.665.140,- outputnya terdiri dari :

Target : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 20 Organisasi

Kelompok Sasaran : Seluruh Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT di Kota Surabaya

Bentuk Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan Kampung di seluruh Kelurahan terkait Kampung Ramah Perempuan dan Anak

Materi Kegiatan : Pembinaan serta pembentukan Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak bagi RT RW di Kelurahan seluruh Kota Surabaya

Frekuensi Pelaksanaan : 15 kali dalam setahun

Alasan Pemilihan Target : Setiap kelurahan di Kota Surabaya terdapat kampung yang terdiri dari RT dan RW yang perlu dibina untuk menjadi Kampung Ramah Perempuan dan Anak

20. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki dua sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Target : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 20 orang

Pagu Anggaran : Rp. 1.435.416.256,-

Kelompok Sasaran : Shelter ABH untuk anak-anak yang merupakan warga Kota Surabaya dan berhadapan dengan hukum Shelter perempuan: Untuk anak-anak perempuan yang merupakan warga Kota Surabaya dan merupakan korban kekerasan

Bentuk Kegiatan : Pemeliharaan dan penyelenggaraan operasional untuk mendukung penanganan permasalahan perempuan dan anak

Materi Kegiatan : Pembinaan Mental Spiritual, Pengawasan dan Monitoring, Perawatan dan Pemeliharaan gedung

Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan

Alasan Pemilihan Target	:	Shelter yang dikelola oleh DP3APPKB ada 2 (Shelter Perempuan dan Shelter ABH)
Sub Kegiatan	:	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Target	:	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 dokumen
Pagu Anggaran	:	Rp. 1.047.203.969,-
Kelompok Sasaran	:	Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Masyarakat, Sekolah di Kota Surabaya
Bentuk Kegiatan	:	Fasilitasi Gugus Tugas Kota Layak Anak, Sosialisasi Dinamika Remaja pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Surabaya
Materi Kegiatan	:	Pemenuhan Klaster KLA yang terdiri dari 24 indikator, serta sosialisasi ke sekolah dengan materi permasalahan yang terjadi pada anak
Frekuensi Pelaksanaan	:	17 pelaksanaan kegiatan seputar fasilitasi Gugus Tugas KLA, Sosialisasi Dinamika Remaja dan Forum Anak Surabaya dalam 1 Tahun
Alasan Pemilihan Target	:	Menyesuaikan jumlah gugus tugas Kota Layak Anak serta Untuk menuju Surabaya Kota Layak Anak perlu melibatkan dukungan data dan kegiatan serta sinergitas antara OPD, Kecamatan, Kelurahan, LSM dan Sekolah

21. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 77.572.960,- outputnya terdiri dari :

Target	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3 dokumen
Kelompok Sasaran	:	Organisasi Keagamaan, organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Adat / Lembaga Profesi / Dunia Usaha / Media / Masyarakat Lainnya
Bentuk Kegiatan	:	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui sosialisasi dan media cetak
Materi Kegiatan	:	Materi terkait yang mendukung pencegahan kekerasan anak menyesuaikan dengan kondisi kasus tahun berjalan
Frekuensi Pelaksanaan	:	3 kali 1 Tahun
Alasan Pemilihan Target	:	Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dilakukan 3 Kali dalam 1 tahun

22. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki dua sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan** : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Target : Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 150 kasus
- Pagu Anggaran : Rp. 845.580.523,-
- Kelompok Sasaran : Anak Korban Kekerasan Termasuk Trafficking Warga Surabaya
- Bentuk Kegiatan : 1. Penerimaan Pengaduan yang dilanjutkan dengan penanganan awal
2. Penerimaan bersumber dari Warga, Command Center, Hotline PPTP2A, Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, Aparat Penegak Hukum, OPD, Kelurahan, Kecamatan, maupun Jejaring PPTP2A
- Materi Kegiatan : Penanganan Awal melalui telepon / chat menyesuaikan kondisi klien
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
- Alasan Pemilihan Target : Jumlah kasus pengaduan dalam 12 Bulan
- Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- Target : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 150 kasus
- Pagu Anggaran : Rp. 198.832.000,-
- Kelompok Sasaran : Anak Korban Kekerasan Termasuk Trafficking Warga Surabaya
- Bentuk Kegiatan : Memberikan Pendampingan dan Penanganan melalui layanan PPTP2A berupa Konseling, Pendampingan Medis, Pendampingan Psikososial, Pendampingan Hukum
- Materi Kegiatan : Pendampingan dan Penanganan yang diberikan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan klien
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
- Alasan Pemilihan Target : Jumlah kasus yang ditangani dalam 12 Bulan

23. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 76.806.000,- outputnya terdiri dari:
- Target : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 2 dokumen
 - Kelompok Sasaran : Konselor / Relawan / NGO Pemerhati Anak dan Perempuan
 - Bentuk Kegiatan : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan manajemen dan penanganan kasus
 - Materi Kegiatan : Pelatihan trauma healing / manajemen kasus / penerapan kode etik perlindungan kekerasan perempuan dan anak maupun materi lain yang terkait manajemen dan penanganan kasus kekerasan
 - Frekuensi Pelaksanaan : 2 Kali dalam 1 Tahun
 - Alasan Pemilihan Target : Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus dilaksanakan 2 kali

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	16,001,275,371	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	13,575,101,046	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12,042,846,424	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10,567,629,918	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3APPKB	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12,042,846,424	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3APPKB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	10,567,629,918	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	3,458,608,469	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2,533,198,720	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3APPKB	Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasikan	15 Rekening	3,458,608,469	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3APPKB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,533,198,720	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	499,820,478	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	474,272,408	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3APPKB	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai	6 Rekening	499,820,478	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3APPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	6 Laporan	474,272,408	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kode rekening yang direalisasikan					Perengkapan Kantor yang Disediakan			
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	2,077,357,847	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	2,108,415,465	
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%				Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	699,864,624	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	623,537,771	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DP3APPKB	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	58 Lembaga	699,864,624	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DP3APPKB	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah	623,537,771	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	600 Orang	415,342,574	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	322,932,471	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP3APPKB	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	4 Kali	415,342,574	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP3APPKB	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	322,932,471	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	21 Kegiatan	962,150,649	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	1,161,945,223	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	740 Orang	962,150,649	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	1,161,945,223	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	46.07 %	355,828,037	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	46.07 %	461,509,750	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	150 Orang	214,497,988	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	150 Orang	244,235,000	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	DP3APPKB	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	150 Orang	214,497,988	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	DP3APPKB	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	75 Satuan Pendidikan	244,235,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	141,330,049	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	217,274,750	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DP3APPKB	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	45,510,000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP3APPKB	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan	1 Dokumen	141,330,049	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP3APPKB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	171,764,750	
4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.35 %	8,973,541,118	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.35 %	10,919,637,632	
			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	83%				Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	83%		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	523,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DP3APPKB	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	483,600,000	
	Pengendalian Program KKBPK					Pengendalian Program KKBPK	DP3APPKB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	40,000,000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	2,740,328,652	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	1,836,351,599	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DP3APPKB	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK	12 kali	1,099,713,625	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DP3APPKB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	995,886,999	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP3APPKB	Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	1566 Orang	1,640,615,027	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP3APPKB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	840,464,600	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	416957 Orang	3,924,406,346	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	416957 Orang	7,970,686,033	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3APPKB	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	415007 Orang	2,040,059,670	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3APPKB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1,656,142,633	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3APPKB	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK	1950 orang	1,500,011,830	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3APPKB	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	5,294,543,400	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DP3APPKB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK	19 Unit	384,334,846	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DP3APPKB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	1,020,000,000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	589,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DP3APPKB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	31 Kecamatan		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DP3APPKB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	31 Kampung	589,000,000	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	647,832,643	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	572,543,337	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	48.38 %				Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	48.38 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	35,377,040	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,377,040	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	247,378,917	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	163,412,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti	20 kasus	94,219,338	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	100,200,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	17 kasus	153,159,579	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	63,212,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	15 kecamatan	400,453,726	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	15 kecamatan	373,754,297	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	150 orang	400,453,726	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	373,754,297	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median usia kawin pertama perempuan	20 tahun	3,703,496,918	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median usia kawin pertama perempuan	20 tahun	15,889,334,760	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.55 %				Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.55 %		
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	43.37 %				Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	43.37 %		
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	41%				Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	41%		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	3,703,496,918		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	15,889,334,760	
			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan				Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan		
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan				Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan				Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	DP3APPKB	Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	196 keluarga	872,134,259	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	DP3APPKB	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	49 Kelompok	1,067,105,902	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)	28 paket	385.655,506	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38 Unit	747,866,000	
		DP3APPKB	Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)	10 paket							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	Jumlah keluarga BKB yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	421 keluarga	509,258,432	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	625 Orang	592,985,245	
		DP3APPKB	Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	65 keluarga							
		DP3APPKB	Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	139 keluarga							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	31 kecamatan	900,326,615	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6642 Orang	12,820,360,000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi	15 keluarga	1,036,122,106	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	661,017,613	
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	245	533,887,988	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	245	668,528,387	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	533,887,988	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	668,528,387	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	2 lembaga	533,887,988	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	668,528,387	
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	414,810,236	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	408,898,881	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	414,810,236	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	408,898,881	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah	2 Kali	414,810,236	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	408,898,881	
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kelurahan Layak Anak	60.38 %	3,418,814,239	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kelurahan Layak Anak	60.38 %	3,230,285,332	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	798,364,992	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	747,665,140	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan	20 Kelurahan	798,364,992	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	747,665,140	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	2,620,449,247	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	2,482,620,192	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan	2 Lembaga	1,361,511,272	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	1,435,416,256	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	431 Lembaga	1,258,937,975	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,047,203,936	
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	1,566,130,175	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	1,198,791,483	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	48.38 %				Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	48.38 %		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kegiatan		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	77,572,960	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	77,572,960	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	15 lembaga	1,566,130,175	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	15 lembaga	1,044,412,523	
			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus				Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah pengaduan yang diterima	150 kasus	1,186,367,185	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	845,580,523	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	379,762,990	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	150 Layanan	198,832,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	76,806,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	76,806,000	
	TOTAL				37,692,974,572	TOTAL				49,033,046,073	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota. Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah.

Forum perangkat Daerah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menghasilkan saran dan masukan pada penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta penyelesaian permasalahan yang mendesak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Masukan yang ada tidak berupa usulan program atau kegiatan, akan tetapi penajaman terhadap bentuk pelaksanaan dan sasaran program dan kegiatan yang telah disusun pada rancangan awal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saran dan Masukan pada Forum Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Rini Indrayani (Ketua TP PKK Kota Surabaya) saran yang diberikan :
 - a. Untuk permasalahan kesehatan ibu dan anak. Prioritas pada stunting. Mengoptimalkan kerja-kerja BKB dan BKR untuk edukasi atau penyuluhan pada remaja, calon ibu atau penyuluhan parenting. Semua kader-kader masyarakat digerakan, baik ditingkat kecamatan, kelurahan hingga rw/rt.
 - b. Sinergi antara DP3AKPPKB, Dinas kesehatan, KUA untuk penuntasan permasalahan pernikahan anak, permasalahan kehamilan tidak diinginkan, atau permasalahan anak dan remaja. Jadi prioritas ada pada sinergi dan kolaborasi.
 - c. Kasus anak dengan kekerasan seksual, kasus anak berhadapan dengan hukum, diharapkan sudah cukup jelas langkah-langkah upaya dari hulu ke hilirnya. Ada kerjasama yang komprehensif antar lembaga terkait, yang secara bersama-sama atau serentak dilakukan, mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan.

Tersebutkan lembaga-lembaga mana yang diajak bersinergi dan berkolaborasi. Bukan hanya sub kegiatan secara makro yang terbaca.

- d. Untuk akseptor KB, sudah ada kader-kader IMP. Diharapkan sasarannya tidak hanya untuk ibu-ibu yang beresiko, tetapi juga bapak-bapak.
 - e. Untuk Layanan PUSPAGA. Sangat bagus sekali, karena menjadi sentral layanan pendidikan dan konseling dan penanganan kasus-kasus keluarga. Akan lebih baik lagi bila layanan seperti puspaga ini juga dibangun di wilayah kecamatan, kelurahan yang dekat dengan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjangkaunya. Baik untuk curhat, pengaduan atau konsultasi. Karena bila aksesnya jauh sering menyurutkan ibu-ibu untuk datang, sehingga permasalahan bisa menumpuk dan bertambah kompleks.
 - f. Untuk pencegahan kasus anak seperti kekerasan, bullying, kekerasan seksual, maupun anak dengan internet, bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan melalui konselor sebaya, yang bisa dioptimalkan. Agar anak bisa gampang curhat dengan teman sebayanya.
2. Lutfi Agus Salim (Koalisi Kependudukan Kota Surabaya) saran yang diberikan :
- a. Strategi secara teknis belum terlihat, hanya terlihat makro saja. Perlu jemput bola dengan datang langsung ke sasaran yang dituju. Contohnya : Harus datang ke sekolah, ketika akan menyentuh pendidikan. Bertemu dengan anak, mengoptimalkan agen-agen anak yang sudah terbentuk untuk edukasi dan sistem pelaporan seperti konselor sebaya.
 - b. Dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi karena ada kelompok atau unit mahasiswa bidang kependudukan yang bisa digerakan untuk turun ke masyarakat melalui RT/RW.
 - c. Memperbanyak sekolah siaga kependudukan dan mahasiswa bisa dilibatkan untuk pendampingan sekolah yang ada.
 - d. Terkait perlindungan perempuan dan anak, ada banyak LSM dan organisasi kemasyarakatan yang bisa dilibatkan untuk pendampingan, baik mulai pencegahan maupun penanganan permasalahan.
 - e. Angka Unmeetneed belum terlihat. Harus ada data terkait target KB yang tidak terpenuhi per wilayah dan per keluarga. Sehingga bisa dianalisis pokok masalahnya dan bisa memetakan wilayah mana saja yang perlu mendapat perhatian serius.

- f. Belum adanya data-data yang berkaitan dengan Kehamilan Usia Remaja. Baik di tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga RT dan RW. Data tersebut dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program.
3. Dita Amalia (Plato Foundation) saran yang diberikan :
 - a. Terkait Perlindungan anak, ada 5 cluster yang harus dicermati berdasarkan KHA (Konvensi Hak Anak) yaitu hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus. Dengan mencermati klaster ini, diharapkan sudah ada upaya pencegahan, dengan melihat potensi-potensi yang akan terjadi. Dan hendaknya diperkuat dengan kerjasama sekolah, melalui perlindungan berbasis sekolah atau Sekolah Ramah Anak dan dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan.
 - b. Kasus anak di tingkat pendidikan juga cukup banyak yang perlu dilakukan upaya pencegahan sejak awal. Contohnya Bullying, sejak dulu banyak terjadi di sekolah, dan kebanyakan berasal dari bully verbal yang bila didiamkan bisa mengarah pada kekerasan fisik. Sehingga program bullying bisa dimasukkan dalam program prioritas untuk upaya pencegahan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan mengoptimalkan peran dari konselor sebaya. Tentu saja harus bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
 - c. Ilmu parenting bagi orang tua juga perlu ditingkatkan, sebagai upaya pencegahan di tingkat keluarga. Agar orang tua bisa mendeteksi perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di anak-anak mereka sehingga langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian ini bisa dilakukan. Contohnya yang berkaitan dengan napza, kekerasan, minuman keras, ataupun pornografi.
 - d. Perlu adanya program penguatan untuk keluarga-keluarga anak dengan HIV, anak dengan napza, anak dengan ABH, karena selama ini belum tersentuh.
 4. Ema Agustina,ST (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) saran yang diberikan :
 - a. Terkait dengan tujuan Pemerintah Kota Surabaya yang berfokus pada pengentasan MBR dan eliminasi balita stunting, diharapkan DP3APPKB dapat berkolaborasi dengan dinas terkait agar pencapaian tujuan kota dapat terlaksana dengan baik.
 - b. Program pengentasan MBR yang dilakukan DP3APPKB melalui UPPKA diharapkan keluarga MBR yang menjadi akseptor dapat mengalami peningkatan pendapatan per bulan yakni sebesar Rp 50.000,00

- c. Dalam program eliminasi balita stunting, target DP3APPKB ada pembagian sebanyak 28 paket BKB Kit Stunting. Setelah pembagian paket diharapkan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh kader berupa laporan di tiap bulannya.
 - d. t0 Nilai Puspaga Kota Surabaya adalah 174, diharapkan bisa dilakukan peningkatan terhadap indikator yang menjadi dasar penilaian PUSPAGA agar dapat mencapai target nilai 209 di tahun 2022 dan target nilai 245 di tahun 2023.
 - e. Perlu adanya sinergi data terkait pendapatan akseptor KB. Dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.
5. Mas Ucik Fatimatuzzahra (YAMATAS) saran yang diberikan :
- Program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga terutama Catin (calon pengantin), PUG, perlindungan perempuan dan anak. Bisa ditambahkan muatan agama di semua unsurnya. Karena ini menjadi penting untuk memberi pedoman dan penguatan ahklak.
6. Suyitno, SH (Perwakilan PKB Wilayah Selatan) saran yang diberikan :
- a. Untuk Di kelas Catin (Calon Pengantin) Diharapkan program yang dulu ada, seperti pembinaan yang berkaitan dengan sisi kesiapan psikologis, mental, komunikasi, manajemen konflik, dan ekonomi bisa dihadirkan kembali untuk para calon pengantin. Dapat berkoordinasi lagi dengan KUA setempat.
 - b. Adanya kendala pada layanan KB. Tidak semua RS bisa melayani MOW. Jika ada kuota dibatasi. Contohnya RS. Dr. Ramlan, hanya memberikan kuota 10. Hal tersebut menyulitkan dalam target pelayanan KB di masyarakat. DPKAPPKB bisa berkoordinasi kembali dengan rumah sakit yang ada.
7. dr. Sofyan Rizalanda, M.Kes (Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur) saran yang diberikan :
- a. Memperbaiki data yang berkaitan dengan data kesejahteraan keluarga.
 - b. Capaian Kinerja perlu data Unmeetneed Kota Surabaya. Yang dapat dilihat hanya Unmeetneed road Jawa Timur, seperti jumlah PUS yang menunda usia kehamilan, yang dikhawatirkan bisa berdampak pada pasangan itu sendiri. Hal tersebut belum terlihat datanya untuk Kota Surabaya.
 - c. Kebutuhan membuka akses Unmeetneed.
 - d. Harap ada perbaikan dan perhatian dari DP3APPKB kota Surabaya terkait terbatasnya layanan MOW di Kota Surabaya.
 - e. Harap data male operation medic (MOP) bisa segera dirilis.

8. Linda Novanti (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya) saran yang diberikan :
Hasil tangkapan PMKS Anak dan Wanita oleh Satuan Polisi Pamong Praja, harap outreach dilakukan di OPD DP3APPK dengan menyesuaikan waktu kerja dari Instansi DP3APPK. Karena OPD Satuan Polisi Pamong Praja belum ada ruangan khusus untuk Outreach Anak dan Wanita.
9. Maria Rosa Poetranto (Wahana Visi Indonesia) saran yang diberikan :
 - a. Dibutuhkan kolaborasi bersama untuk program peningkatan kualitas keluarga, dengan sasaran keluarga (ayah, ibu, anak) mengingat partisipasi masyarakat untuk pengasuhan lebih banyak di ikuti oleh ibu atau pengasuh. Saatnya ayah juga dilibatkan.
 - b. Penguatan program untuk perlindungan anak dan remaja, mengingat selama pandemi angka kekerasan pada anak cukup meningkat. Dengan kondisi ini cukup penting meningkatkan kapasitas dan lifeskill pada anak dan remaja (sesuai sasaran/ kelompok usia) baik melalui sekolah maupun forum anak.
10. Bayu Prabhata Arinugraha (BPBD) saran yang diberikan :
Dibutuhkan pelatihan konseling dalam rangka trauma healing korban bencana yang diberikan kepada satgas penanggulangan bencana.

2.5.2 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Musrenbang RKPD kota dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, Klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan;
3. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
4. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
5. Sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Pimpinan atau

anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat PD provinsi dan pejabat PD kabupaten/kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota. Hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

2.5.3 Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 fokus pada pemulihan sosial ekonomi untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang diterjemahkan dalam 7 Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam), dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMN 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Sedangkan indikator sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,2-5,8 (%)
2. Tingkat Kemiskinan dengan target 8,5-9,0 (%)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 5,5-6,3 (%)
4. Rasio Gini dengan target 0,376-0,378
5. Indeks Pembangunan Manusia dengan target 73,41-73,46
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan target 26,87 (%)

7. Nilai Tukar Petani dengan target 103-105
8. Nilai Tukar Nelayan dengan target 104-106

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Agenda Pembangunan RKP 2022 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pada prioritas nasional ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Strategis Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya;
2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

3.2.1 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan masing-masing tujuan ditetapkan satu atau beberapa sasaran strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya, memiliki sasaran:
 - b. Mewujudkan keluarga yang berkualitas;
 - c. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
2. Tujuan : Meningkatkan Pengarus Utamaan Gender, Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak, memiliki sasaran :
 - a. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Program dan kegiatan harus selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang maupun Forum Perangkat Daerah.
2. Program dan kegiatan harus selaras dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah Kota Surabaya.
3. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT, anak berhadapan dengan hukum, dan *trafficking* (perdagangan orang). Pemerintah Kota Surabaya telah menciptakan sistem untuk melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menjadi Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan tahun 2023. Isu-isu berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Perubahan RENSTRA Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, hal ini bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan permasalahan perempuan dan anak antara lain trafficking, permasalahan remaja lainnya yang salah satunya dipicu oleh dampak pandemi Covid-19.
2. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
3. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi.
2. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmet need).
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
4. Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja / beraktivitas di Kota Surabaya.

4.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana sebagian menjadi urusan yang sesuai dengan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2023, rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun berdasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran terdiri dari 10 Program, 23 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan.

4.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menyusun Program dan kegiatan untuk tahun 2023 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan : Pelembagaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan : Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui
Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK
- Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
- Sub Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan
Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya
- Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
- Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
- Sub Kegiatan : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat
Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia
(BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Sub Kegiatan : Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan diuraikan secara detail pada Tabel 3.1 tentang rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		100%	Rp 13.575.101.046			100%	Rp 16.351.861.097
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	Rp 10.567.629.918			100 %	Rp 12.343.917.584
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DP3APPKB	24 Orang/bulan	Rp 10.567.629.918			24 Orang/bulan	Rp 12.343.917.584
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100 %	Rp 2.533.198.720			100 %	Rp 3.447.701.601
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP3APPKB	5 Paket	Rp 2.533.198.720			5 Paket	Rp 3.447.701.601
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah		100 %	Rp 474.272.408			100 %	Rp 560.241.912

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3APPKB	6 Laporan	Rp 474.272.408			6 Laporan	Rp 560.241.912
2.08.02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100%	Rp 2.108.415.465			100%	Rp 2.127.600.606
		Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender		100%				100%	
2.08.02.2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	Rp 623.537.771			3 Dokumen	Rp 709.549.895
2.08.02.2.01.03		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DP3APPKB	58 Perangkat Daerah	Rp 623.537.771			58 Perangkat Daerah	Rp 709.549.895
2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		600 Orang	Rp 322.932.471			600 Orang	Rp 420.088.874
2.08.02.2.02.02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP3APPKB	31 Organisasi	Rp 322.932.471			31 Organisasi	Rp 420.088.874

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		21 Kegiatan	Rp 1.161.945.223			21 Kegiatan	Rp 997.961.837
2.08.02.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	740 Orang	Rp 1.161.945.223			740 Orang	Rp 997.961.837
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100%	Rp 572.543.337			100%	Rp 665.912.329
				48.38 %				64.51 %	
2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	Rp 35.377.040			1 Kegiatan	Rp 0
2.08.03.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	1 Dokumen	Rp 35.377.040			1 Dokumen	Rp 35.377.040

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		20 kasus	Rp 163.412.000			20 kasus	Rp 254.823.745
2.08.03.2.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	20 Orang	Rp 100.200.000			20 Orang	Rp 97.795.376
2.08.03.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	17 Layanan	Rp 63.212.000			17 Layanan	Rp 157.028.369
2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		15 kecamatan	Rp 373.754.297			20 kecamatan	Rp 411.088.584
2.08.03.2.03.04		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	1 Dokumen	Rp 373.754.297			1 Dokumen	Rp 411.088.584
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		245	Rp 668.528.387			246	Rp 520.589.869
2.08.04.2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 laporan	Rp 668.528.387			12 laporan	Rp 520.589.869

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.04.2.03.01		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	2 Layanan	Rp 668.528.387			2 Layanan	Rp 520.589.869
2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		100%	Rp 408.898.881			100%	Rp 420.799.717
2.08.05.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		58 Lembaga	Rp 408.898.881			58 Lembaga	Rp 420.799.717
2.08.05.2.01.01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	1 Dokumen	Rp 408.898.881			1 Dokumen	Rp 420.799.717
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		60.38 %	Rp 3.230.285.332			79.87 %	Rp 3.465.327.764
2.08.06.2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		1 kegiatan	Rp 747.665.140			1 kegiatan	Rp 834.253.991
2.08.06.2.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	20 Organisasi	Rp 747.665.140			20 Organisasi	Rp 834.253.991
2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan		3 kegiatan	Rp 2.482.620.192			3 kegiatan	Rp 2.631.073.773

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.06.2.02.01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	20 Orang	Rp 1.435.416.256			20 Orang	Rp 1.359.115.598
2.08.06.2.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	1 Dokumen	Rp 1.047.203.936			1 Dokumen	Rp 1.271.958.175
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100%	Rp 1.198.791.483			100%	Rp 1.548.555.439
				Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak		48.38 %		64.51 %	
2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		3 Kegiatan	Rp 77.572.960			3 Kegiatan	Rp 0
2.08.07.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	3 Dokumen	Rp 77.572.960			3 Dokumen	Rp 77.572.960

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.2.02			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak		15 lembaga	Rp 1.044.412.523			20 lembaga	Rp 1.548.555.439
				Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus		150 kasus				150 kasus	
2.08.07.2.02.01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	150 Orang	Rp 845.580.523			150 Orang	Rp 1.159.369.097
2.08.07.2.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	150 Layanan	Rp 198.832.000			150 Layanan	Rp 389.186.342
2.08.07.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Kegiatan	Rp 76.806.000			2 Kegiatan	Rp 0
2.08.07.2.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB	2 Dokumen	Rp 76.806.000			2 Dokumen	Rp 76.806.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan		46.07 %	Rp 461.509.750			63.06 %	Rp 363.015.151
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan		150 Orang	Rp 244.235.000			160 Orang	Rp 220.005.103
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	DP3APPKB	75 Satuan Pendidikan	Rp 244.235.000			75 Satuan Pendidikan	Rp 220.005.103
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan		58 Perangkat Daerah	Rp 217.274.750			58 Perangkat Daerah	Rp 143.010.048
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	DP3APPKB	1 Dokumen	Rp 45.510.000			1 Dokumen	Rp 45.510.000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP3APPKB	1 Dokumen	Rp 171.764.750			1 Dokumen	Rp 143.010.048
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi		18.35 %	Rp 10.919.637.632			18.10 %	Rp 9.334.373.212

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi		83%				84%	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya		31 Kecamatan	Rp 523.600.000			31 Kecamatan	Rp 0
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DP3APPKB	1 Laporan	Rp 483.600.000			1 Laporan	Rp 483.600.000
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	DP3APPKB	1 Laporan	Rp 40.000.000			1 Laporan	Rp 40.000.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP		12 Kali	Rp 1.836.351.599			12 Kali	Rp 2.828.590.651
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DP3APPKB	1 Laporan	Rp 995.886.999			1 Laporan	Rp 1.137.533.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.02.04		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP3APPKB	1566 Orang	Rp 840.464.600			1566 Orang	Rp 1.691.057.651
2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		416957 Orang	Rp 7.970.686.033			417003 Orang	Rp 4.113.450.401
2.14.03.2.03.01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3APPKB	1 Laporan	Rp 1.656.142.633			1 Laporan	Rp 2.139.361.614
2.14.03.2.03.03		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3APPKB	1950 Orang	Rp 5.294.543.400			1950 Orang	Rp 1.579.069.432
2.14.03.2.03.06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DP3APPKB	19 Unit	Rp 1.020.000.000			19 Unit	Rp 395.019.355
2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		4 Laporan	Rp 589.000.000			4 Laporan	Rp 2.392.332.160
2.14.03.2.04.03		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DP3APPKB	31 Kampung	Rp 589.000.000			31 Kampung	Rp 2.392.332.160

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	20 tahun	Rp 15.889.334.760			21 tahun	Rp 4.055.328.602	
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.55 %				41.56 %		
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	43.37 %				47.50 %		
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	41%				42%		
2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	Rp 15.889.334.760			10 Kelompok	Rp 4.055.328.602	
			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan				1 Laporan		
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan				1 Laporan		
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan				1 Laporan		
2.14.04.2.01.01		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	DP3APPKB	49 Kelompok	Rp 1.067.105.902			49 Kelompok	Rp 937.835.961

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.01.02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	38 Unit	Rp 747.866.000		38 Unit	Rp 394.556.773
2.14.04.2.01.04		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	625 Orang	Rp 592.985.245		625 Orang	Rp 534.249.286
2.14.04.2.01.05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	6642 Orang	Rp 12.820.360.000		6642 Orang	Rp 932.854.669
2.14.04.2.01.07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB	1 Laporan	Rp 661.017.613		1 Laporan	Rp 1.255.831.913
						Rp 49.033.046.073			Rp 38.853.363.786

*Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam prakiraan maju rencana th.2024 mempertimbangkan prediksi inflasi dan prediksi kenaikan UMK.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD tahun 2023. Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan disempurnakan menjadi dokumen Renja berdasarkan Perwali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 2 Agustus 2022

KEPALA DINAS,



Tom Aryanto
Tom Aryanto, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197304271993111001